

see for 19/11

Brison Minta Penambahan Kuota

Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Pekalongan melakukan koordinasi bersama Pemkab dan DPRD, menyusul sebanyak 846 guru honorer di wilayah itu yang belum terdaftar sebagai penerima insentif.

Brison Setiadi, Ketua PGSI Kabupaten Pekalongan, mengatakan, sosialisasi terkait dengan pemberian insentif kepada guru honorer yang dilakukan sejak 2017 belum maksimal.

“Banyak guru honorer yang hingga kini belum tahu tentang adanya uang insentif tersebut,” katanya, saat rapat koordinasi di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (12/2).

Menurut dia, tidak hanya para pengajar, pihak sekolah juga tidak semua mendapat sosialisasi mengenai adanya uang insentif bagi guru honorer itu.

“Bahkan, banyak sekolah belum tahu bahwa penjaga sekolah juga berhak diusulkan mendapatkan uang insentif,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi itu, Brison berharap ada penambahan kuota insentif untuk para guru dan penjaga sekolah di Kabupaten Pekalongan.

“Memang selama ini sebagian sudah mendapatkan insentif sebesar Rp200 ribu dari Pemkab, tetapi tambahan itu untuk yang sudah terdata dalam data base, dan yang tidak terdaftar ya tidak dapat,” jelasnya.

Mengusulkan

Adapun, Kundarto, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, akan mengusulkan pendataan ratusan guru honorer yang belum masuk ke data base penerima insentif itu.

“Kami akan segera koordinasikan bersama pemkab terkait dengan pendataan tersebut, karena peran guru sangat vital dalam mencerdaskan bangsa,” ucapnya.

Menurut dia, koordinasi harus dilakukan karena penambahan kuota insentif guru tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tapi kami akan tetap mengusulkan untuk mendata ratusan guru honorer tersebut ke pemkab,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi sempat menyampaikan, pemberian tunjangan guru non-PNS, termasuk guru TPQ dan Madin akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada 2019, bupati menyatakan, telah dialokasikan Rp 21 miliar lebih untuk guru SD, SMP di sekolah negeri dan swasta, Rp6,6 miliar untuk guru Madin dan TPQ.

Berdasar data yang ada, jumlah guru honorer sebanyak di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 2.331 orang. Dari data itu, sebanyak 1.914 guru honorer menerima bantuan Rp500 ribu per bulan yang telah dianggarkan sejak 2017.

Sumber Berita :

Tribun Jateng, Rabu, 13 Februari 2019.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- Pasal 1
 - a. Angka 28 menyatakan bahwa Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
 - b. Angka 30 menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- Pasal 226
 - a. Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib memiliki sistem informasi manajemen karier instansi.
 - b. Ayat 2 menyatakan Sistem informasi manajemen karier instansi berisi informasi mengenai rencana dan pelaksanaan manajemen karier.
 - c. Ayat 3 menyatakan bahwa Sistem informasi manajemen karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.
 - d. Ayat 4 menyatakan PPK wajib memutakhirkan data dan informasi dalam sistem informasi manajemen karier instansi.
 - e. Ayat 5 menyatakan bahwa PPK memasukkan data dan informasi manajemen karier di lingkungannya ke dalam Sistem Informasi ASN paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
- Pasal 227
 - a. Ayat 1 menyatakan bahwa Sistem informasi manajemen karier secara nasional dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan data penyelenggaraan manajemen karier oleh setiap instansi.
 - b. Ayat 2 menyatakan bahwa BKN wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan data penyelenggaraan manajemen karier paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian informasi oleh instansi.